

# **ANALISIS WACANA WATERFRONT CITY DALAM PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU**

Oleh : Panji Suryadarma  
Pembimbing : Dr Hasanuddin, M.Si  
(email: [panjisuryadarma@yahoo.co.id](mailto:panjisuryadarma@yahoo.co.id))  
(CP: 085271714641)

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the extent to which the discourse of Waterfront City Pekanbaru effects on urban development. The main problem in this research is how the realization of discourse Waterfront City. Discourse of Waterfront City, taken by the government to arrange along the Siak river in Pekanbaru. The aim of Waterfront City discourse is making siak river as front page of the city of Pekanbaru, so it takes a beautifully landscaped area. This research is a qualitative study, so the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This study uses interviews with key informants as the object of information that aims to achieve the goal to get the information in the study. The types of data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants in this study. Based on the results of research in the field, it can be concluded that although the form of discourse Waterfront City, but it turned out to Waterfront City is such a policy. Just like a policy that has consequences for the budget implementation, discourse of Waterfront City, in some scenarios the consequences of its activities also got the budget, both the budget and the state budget. Based on the results of the field study, too, found not all scenarios - scenarios in discourse Waterfront City is completed. This shows the existence of barriers - barriers in implementing the program - a program in the discourse Waterfront City. Some of the obstacles in implementing Waterfront City is, the absence of local regulation that specifically regulate the implementation of Waterfront City development, the lack of coordination among agencies, overlapping land ownership, lack of political will of the Government, and lack of socialization discourse of Waterfront City is to the society.

Keyword: analysis, discourse, policy

## **I. PENDAHULUAN**

Pesatnya pertumbuhan kota Pekanbaru membuat semakin bertambahnya arus perpindahan penduduk menuju Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan munculnya wilayah – wilayah pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Bagi warga dengan tingkat penghasilan mencukupi, atau bahkan cenderung kurang, tempat tinggal dengan biaya murah dan kualitas bangunan seadanya tentu menjadi pilihan utama. Kondisi demikian ini pada akhirnya mendorong semakin bertambahnya wilayah pemukiman – pemukiman dengan karakteristik kumuh semakin bertambah di Pekanbaru.

Di Kota Pekanbaru sendiri, keberadaan pemukiman dengan ciri – ciri karakteristik kumuh dapat dijumpai pada beberapa lokasi, seperti di kawasan tanjung datuk, kawasan teluk leok, kawasan kelurahan sago, dan beberapa tempat di sepanjang aliran sungai Siak.

Kawasan kumuh di tepian sungai Siak dapat dilihat dari padatnya penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, struktur bangunannya menggunakan bahan – bahan tradisonal, sanitasi rendah, tata kawasan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Suatu deskripsi kawasan pemukiman yang sangat tidak ideal untuk di tempati. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah konsep penataan kawasan (ruang) agar kawasan tersebut menjadi ideal / layak ditempati oleh masyarakat.

Berdasarkan identifikasi terdapat bermacam permasalahan bagi sebuah kawasan di sepanjang aliran sungai siak di Pekanbaru. Berbagai permasalahan yang berhasil penulis identifikasi antara lain:

1. Kawasan sungai Siak kurang terintegrasi terhadap sistem pembangunan Kota Pekanbaru terutama dari segi tata ruang kawasan, sarana dan prasarana kawasan, maupun aktivitas sosial, budaya, dan ekonominya.
2. Keberadaan pabrik / industri yang tidak tertata menimbulkan pencemaran terhadap ekologi sungai siak
3. Munculnya pemukiman penduduk yang tidak terkendali di sepanjang kawasan bantaran sungai menambah kesan kumuh terhadap kawasan ini
4. Pada beberapa lokasi, secara umum saluran drainase pembuang menuju drainase utama di sungai Siak masih kurang kuantitasnya karena elevasinya yang hampir datar, terputus putus arah aliran drainasenya, dan sering kurang tepat karena justru menjauhi saluran drainase primer dan belum memadai kualitasnya. Selain itu, konstruksi beberapa saluran air yang berbelok – belok dan titik belokannya berbentuk siku akibat kepadatan pemukiman dapat mengurangi kapasitas aliran.
5. Banyak dijumpai perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga padat ataupun cair kedalam saluran – saluran yang tersedia, disepanjang jalan dan saluran drainasenya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kawasan bantaran Sungai Siak perlu di normalisasikan, lebih diberdayakan dan diintegrasikan terhadap sistem pembangunan sarana dan prasarana kota. Mengingat kawasan ini mewadahi beberapa kompleksitas signifikan potensi dan permasalahan lingkungan, seperti:

1. Adanya pemukiman asli melayu dengan aktifitas budaya yang perlu dilestarikan.
2. Pemukiman kumuh dan bangunan liar disepanjang sungai dan dibawah tanggul yang perlu ditata
3. Kawasan grosir, warung rumah makan dan kota yang perlu ditata.
4. Pasar lokal dan regional yang perlu dikembangkan.
5. Kawasan perkantoran social, pendidikan yang perlu ditata.
6. Daerah hijau yang perlu dilindungi
7. Lahan kosong yang perlu dioptimalisasikan pemanfaatannya.
8. Pelabuhan dan dermaga yang perlu ditingkatkan manajemennya.
9. Lalu lintas kendaraan dan sungai yang berintensitas tinggi perlu ditingkatkan manajemennya.
10. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat rencana kerja yang dikemas dalam wacana *Master Plan* Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru (lebih dikenal dengan Waterfront City Pekanbaru) yang dijadikan pedoman dalam pembangunan dan penataan kawasan di sepanjang bantaran sungai Siak. *Master Plan* Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru menitikberatkan pada konsep pembangunan Waterfront City (Kota di depan Air).

Mengacu pada UU no 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan kemudian diperbarui oleh UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 3 disebutkan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan,
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam konteks ini, penataan ruang suatu kawasan harus berdasarkan karakteristik daerah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses perencanaan tata guna lahan (*Land Use Planning*) yang merupakan suatu proses perencanaan terhadap pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi.

Berdasarkan wacana *Master Plan* Penataan Kawasan Sungai Siak, Pemko Pekanbaru bersama pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2002 telah mewacanakan untuk menata kawasan di sepanjang tepian sungai siak dengan konsep Waterfront City. Wacana Waterfront City tersebut merupakan acuan bagi pengembangan kawasan di kawasan tepian sungai siak tersebut. Wacana Waterfront City nantinya akan mencakup daerah seluas 8000ha dikedua sisi sungai siak.

Wilayah – wilayah yang termasuk dalam kawasan pengembangan kawasan Waterfront City, adalah keseluruhan wilayah dari Jembatan Siak II ke arah timur sepanjang 8 Km hingga ke muara sungai Sail. Secara administratif, kawasan Waterfront City, terdiri atas 4 Kecamatan dan 8 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Rumbai, meliputi Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Limbungan (Teluk Leok)
2. Kecamatan Tampan, yaitu Kelurahan Tampan
3. Kecamatan Senapelan, meliputi Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Bandar, dan Kampung Dalam
4. Kecamatan Lima Puluh, meliputi Kelurahan Pesisir dan Kelurahan Tanjung Rhu.

Sejak tahun 2002, wacana Waterfront City telah di gulirkan oleh Pemko Pekanbaru, bersama pemerintah provinsi Riau. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang terdapat dalam wacana Waterfront City, Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan dana yang sangat besar. Pada tahun anggaran 2011 yang lalu, dalam APBD Provinsi Riau telah dianggarkan Rp 250 miliar untuk menggesa penyelesaian Waterfront City ([www.riaupos.co](http://www.riaupos.co) 24 januari 2012). Sedangkan pada tahun anggaran 2013 ini, dalam APBD Provinsi Riau kembali dianggarkan sebesar Rp 200 miliar ([www.riaupos.co](http://www.riaupos.co) 6 September 2012).

Setelah 10 tahun sejak digulirkannya Wacana Waterfront City, menarik untuk mengetahui sejauh mana program – program yang terdapat dalam wacana Waterfront City memberikan pengaruh terhadap pembangunan kota Pekanbaru, khususnya di wilayah sepanjang tepian Sungai Siak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul ANALISIS WACANA WATERFRONTCITY DALAM PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU

## II. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Wacana Waterfront City dalam pembangunan Kota Pekanbaru, dengan focus penelitian pada bagaimanakah Realisasi wacana Waterfront City?

### III. Teori

Wacana Waterfront City merupakan wacana yang diambil oleh pemerintah untuk menata kawasan di sepanjang aliran sungai siak di Pekanbaru. Wacana menurut Sobur Alex (2001) adalah rangkaian ujar atau tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang diungkapkan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. Jadi wacana adalah proses komunikasi menggunakan simbol – simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa – peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana, pesan – pesan komunikasi seperti kata – kata, tulisan, gambar – gambar, dan lain – lain, tidak bersifat netral atau steril.

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara.

Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan didalamnya terdapat serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu. Rangkaian keputusan dan tindakan tersebut menurut Dunn (2000:14), merupakan tahap-tahap proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari fase fase perumusan masalah, penyusunan agenda, fase formulasi kebijakan, fase adopsi kebijakan, fase implementasi kebijakan, fase penilaian kebijakan.

#### a. Fase Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan dan Dunn (2000:25) menyatakan perumusan masalah merupakan suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Prasyarat perumusan masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah.

karenanya sangat menentukan proses kebijakan berikutnya. Merumuskan masalah secara benar penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Proses kebijakan dapat mengalami kesalahan tipe III, yaitu melakukan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah (Muhadjir Darwin, 1995:1). Agar dapat dirumuskan kebijakan secara benar, masalah kebijakan perlu lebih dahulu dirumuskan secara benar.

Menurut Darwin, ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan, yaitu:

“(1) menyangkut kepentingan masyarakat luas, (2) serius dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja, (3) potensial menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saat ini belum berkembang cukup serius, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius, (4) ada peluang untuk memperbaiki”.

b. Fase Penyusunan Agenda

Para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR/D), kalangan eksekutif (presiden dan para pembantunya, Gubernur, Bupati/Walikota) dan agen-agen pemerintah lainnya. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya.

c. Fase Formulasi Kebijakan

Setelah beberapa problema umum (*public problem*) dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah (Irfan Islamy, 2001:92). Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. *Public problem* yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijakan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijakan untuk memecahkan masalah tadi.

d. Fase Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan (Dunn, 2000:24). Berhubungan dengan itu, Soenarko, menyatakan bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apakah suatu keputusan yang diambil akan diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali (*reformulated*) atau memang ditolak sama sekali (*rejected*). Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan (Soenarko, 1998:179).

e. Fase Implementasi Kebijakan

Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Tahap implementasi kebijakan mencakup sejumlah kegiatan yaitu : 1) menyediakan sumber daya bagi pelaksana kegiatan; 2) melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan menurut

waktu, tempat situasi, dan anggaran; 3) pengorganisasian secara rutin atas personil anggaran, dan sarana materi lainnya; 4) memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan penagturan perilaku terhadap individu, dan masyarakat pada umumnya (Ramlan Surbakti, 1992:199).

#### IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (1983:63) metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada waktu dan saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya.

#### V. Wacana Waterfront City

*Water / River Front City* dapat diartikan suatu perencanaan kawasan sungai (ruang, perairan, bantaran sungai dan lingkungan sekitar sungai) dimana sungai tidak lagi dimanfaatkan sebagai sisi belakang namun menjadi sisi depan dari pada wajah kota.

Skenario pelaksanaan waterfront City terdiri dari beberapa skenario sebagai berikut:

1. Skenario Aksesibilitas Kawasan
2. Skenario Ekologi Sungai Siak
3. Skenario Rencana Teknik Penanganan Sungai Siak
4. Skenario Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota
5. Skenario Pengembangan Pemukiman (Housing development)

#### VI. Realisasi wacana Waterfront City

##### 1. Skenario Aksesibilitas Kawasan

Peningkatan Aksesibilitas Kawasan, seperti disampaikan bapak Syafri Afis, Kasi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, ditujukan agar sebagai kawasan yang menjadi halaman depan kota Pekanbaru, kawasan ini dapat diakses dari segala penjuru.

##### 2. Skenario Ekologi Sungai Siak

Skenario menyelamatkan Ekologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak menjadi penting untuk dilakukan mengingat kondisi DAS Siak termasuk DAS yang kritis. Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang batas ketentuan sungai yang lestari dan tingginya sedimentasi.

Dalam skenario penyelamatan Ekologi DAS Siak dalam wacana Waterfront City, terdapat langkah – langkah sebagai berikut

1. Merelokasi kawasan industri yang berada di tepian sungai siak
2. Pengendalian limbah domestik kota (rumah tangga, hotel, restoran, dll) melalui sistem drainase kota
3. Pengolahan vegetasi di sepanjang aliran sungai siak, sebagai kawasan hijau kota
4. Pengendalian secara ketat limbah buangan PLTD dan Pertamina
5. Merelokasi kawasan industri plywood, dan merubahnya menjadi kawasan non produktif (komersial,dll)
6. Pengolahan habitat vegetasi flora dan fauna untuk konservasi, dan
7. Pengendalian kawasan hijau.

### 3. Skenario Rencana Teknik Penanganan Sungai Siak

Skenario rencana teknik penanganan sungai siak, memiliki 2 sasaran, yakni, pengendalian banjir sungai dan banjir pada kawasan perkotaan. Pengendalian banjir sungai meliputi, pembangunan tanggul, menurunkan peil banjir, menyelaraskan alur, pengendalian erosi, mengamankan investasi kota, meningkatkan nilai lahan, pengendalian pencemaran, serta menyiapkan kawasan kota.

Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam pengendalian banjir meliputi:

1. Pembuatan tanggul di sepanjang 23,0 km dari jembatan siak II sampai muara sungai sail
2. Pembuatan Tanggul sepanjang 8 Km di desa Tj Rhu dan jalan diatas tanggul sepanjang 8000 m
3. Normalisasi sungai sepanjang 3,15 Km pada level 0 + 00, selebar 2 m
4. Penataan prasarana sanitasi di desa pesisir dan kampung bandar
5. Penataan sistem persampahan di desa pesisir dan kampung bandar
6. Penataan sistem jaringan air bersih di desa pesisir dan kampung bandar
7. Pembuatan jalan tanggul dan penataan lingkungan sesuai peruntukan.
8. Normalisasi saluran drainase di kawasan pemukiman (main drainage)
9. Peningkatan jalan perdagangan di Kampung Bandar
10. Pembuatan pompa banjir yang tersebar di sepanjang sungai siak
11. Pembuatan jalan pelantar dan siring di kampung bandar
12. Pembangunan gorong – gorong dan box, dan klep
13. Pembangunan jembatan jalan lingkungan dan kawasan

Keseluruhan langkah – langkah tersebut ada yang sudah selesai dekrjakan, dan ada juga yang belum selesai dikerjakan

### 4. Skenario Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

Pengembangan sarana dan prasarana kota meliputi sistem drainase dan sistem sanitasi, air bersih, dan persampahan. Berdasarkan masterplan penataan kawasan sungai siak, sebagai Water / River Front City, yang menjadikan sungai sebagai halaman depan kota, maka kawasan tepian sungai siak perlu direncanakan dengan sistem saluran drainasenya. Pada beberapa lokasi, secara umum saluran drainase pembuang menuju drainase utama di sungai Siak masih kurang kuantitasnya karena elevasinya yang hampir datar, terputus putus arah aliran drainasenya, dan sering kurang tepat karena justru menjauhi saluran drainase primer dan belum memadai kualitasnya. Sedangkan untuk sistem sanitasi, air bersih, dan persampahan, dalam masterplan ini secara umum mengarahkan pada sistem komunal, dengan harapan agar dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama. Hal ini khususnya diarahkan pada masyarakat yang bertempat tinggal betul – betul di tepi sungai.

### 5. Skenario Pengembangan Perumahan (Housing development)

Skenario pengembangan Pemukiman (Housing Development) merupakan penataan kawasan pemukiman di sepanjang tepian sungai. Pengembangan pemukiman ditepian sungai siak dimaksudkan agar tujuan menjadikan air / sungai sebagai halaman depan kota dapat terwujud. Perumahan di sepanjang tepian sungai perlu ditata sedemikian rupa agar menjadi halaman depan kota yang indah. Salah satu

harapan dari skenario ini adalah agar setiap rumah yang saat ini membelakangi sungai, dapat dirubah arahnya menjadi menghadap sungai.

Langkah – langkah yang akan ditempuh dalam pengembangan perumahan ini mencakup Konservasi, Renewal, Resettlement, dan Upgrading sarana dan prasarana perumahan yang ada.

Untuk melaksanakan skenario pengembangan pemukiman ini, pemerintah telah melakukan riset di 4 kelurahan yang berbatasan langsung dengan tepi sungai siak untuk mengetahui berapa unit rumah (kepala keluarga) yang layak dilakukan resettlement, renewal, maupun upgrading. Berdasarkan hasil riset tersebut, sebagian besar masyarakat (75% = 825 KK) bersedia untuk di Resettlement / direlokasi ketempat yang baru. Persentase ini diikuti oleh kelompok yang hanya bersedia melakukan Renewal terhadap rumahnya (16% = 179 KK), dan kelompok terakhir hanya melakukan Upgrading terhadap rumahnya (9% = 98 KK).

## VII. Hambatan Dalam Pembangunan Waterfront City

Implementasi Wacana Waterfront City sejak pertama kali di gulirkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya seluruh skenario yang telah di rencanakan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya yaitu :

### 1. Ketiadaan Payung Hukum Untuk Melaksanakan Masterplan Penataan Kawasan Sungai Siak.

Ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan Masterplan penataan kawasan sungai siak, menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan secara bertahap sesuai skenario yang telah di tentukan. Hal tersebut menyebabkan semua satuan kerja mengerjakan masterplan tersebut secara sporadis. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Kasi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau, bapak Syafri Afis.

“Tidak adanya peraturan pelaksanaan di daerah menyebabkan setiap satuan kerja menjalankan programnya secara sporadik, sehingga target pencapaiannya tidak bisa diukur secara riil,”

### 2. Kurangnya koordinasi diantara setiap instansi

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui ada faktor lain yang menghambat terlaksana masterplan Waterfront City sungai Siak ini, yaitu kurangnya koordinasi diantara aparat pemerintah terkait. Berikut penuturan Bapak Muhaimin, Lurah Meranti Pandak, satu dari beberapa kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan masterplan ini.

“Selama ini kita tidak pernah dilibatkan langsung dengan program ini, biasanya kita dilibatkan apabila sudah terjadi masalah disini seperti ada masyarakat yang tidak ingin melakukan pembebasan lahan atau hal lainnya yang tidak bisa diatasi oleh kontraktor yang melaksanakan program ini. Kebanyakan mereka melakukan program tersebut tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan kita,”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tampaknya perlu adanya kerjasama serta kordinasi yang baik antara pemerintah Kota dengan pemerintah Kelurahan serta masyarakat sekitar demi mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, serta mendapatkan hasil yang optimal terhadap realisasi program tersebut.

### 3. Terdapat lebih dari satu surat kepemilikan tanah untuk satu bidang tanah.

Banyaknya surat tanah untuk satu bidang tanah merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan pembangunan Waterfront City. Hal ini terkait, jika pihak

pemerintah akan melakukan suatu pembangunan diatas tanah tersebut, maka menyulitkan pihak pemerintah untuk berkomunikasi dengan pemilik tanah yang paling berhak.

“Tumpang tindih kepemilikan tanah, harus kita akui juga menghambat kerja kita dalam melaksanakan program Waterfront City ini,” tegas ibu Vitria Susanti, staff Studio Penataan Kawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

4. Kurangnya political will dari pemerintah  
Untuk menyelesaikan penataan kawasan di sepanjang aliran sungai siak, berdasarkan konsep Waterfront City, seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama apabila memang Pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikannya.  
“Sebenarnya untuk menyelesaikan Waterfront City ini tidak butuh lama, tergantung political will dari pemerintahnya saja, baik dari Gubernur maupun Walikota,” tegas Syafril Tamun, Kabid SDA Dinas PU Provinsi Riau.
5. Kurangnya Sosialisai konsep Waterfront City kepada masyarakat  
Konsep Waterfront City, ternyata belum diketahui seluruhnya oleh masyarakat yang menetap di wilayah pembangunan Waterfront City. Berdasarkan temuan penulis, masih ada masyarakat yang belum mengetahui kalau wilayah tempat tinggalnya termasuk dalam rencana pembangunan Waterfront City.

#### VIII. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan Analisa Wacana Waterfront City dalam Pembangunan Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Wacana Waterfront City merupakan jalan keluar bagi penataan kawasan di sepanjang aliran sungai siak Pekanbaru. Karena wacana Waterfront City telah mencakup semua rencana tata ruang dan kawasan di wilayah tersebut. Wacana Waterfront City terdiri atas beberapa skenario, sebagai berikut
  - Skenario Aksesibilitas kawasan
  - Skenario Ekologi Sungai Siak
  - Skenario Rencana Teknik Penanganan Sungai Siak
  - Skenario Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota
  - Skenario Pengembangan Perumahan
2. Walaupun telah digulirkan sejak tahun 2002, ternyata Waterfront City, belum sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus pelaksanaan wacana tersebut.
3. Tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan Waterfront City, membuat pelaksanaannya berjalan sporadis dan tidak sesuai tahapan – tahapannya, sehingga tidak bisa diukur secara jelas.
4. Walaupun masih berupa wacana, namun ternyata Waterfront City sudah seperti sebuah kebijakan. Layaknya sebuah kebijakan yang mempunyai konsekuensi anggaran untuk pelaksanaannya, wacana Waterfront City, pada beberapa skenario kegiatannya juga mendapat konsekuensi anggaran, baik dari APBD maupun APBN.

5. Kurangnya koordinasi diantara instansi terkait menyebabkan wacana Waterfront City tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih masukan agar kedepannya lebih baik.

1. Sebagai sebuah wacana penataan kawasan yang telah digulirkan sejak tahun 2002, sudah seharusnya wacana Waterfront City mendapatkan payung hukum berupa Perda, agar pelaksanaan kedepannya menjadi lebih baik dan sesuai tahapan – tahapannya.
2. Untuk melaksanakan wacana Waterfront City tersebut, diperlukan kerjasama dan kordinasi yang jelas antara instansi – instansi yang terkait, maupun antara pemerintah dan masyarakat demi keberhasilan program tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut sehingga masyarakat seluruhnya dapat mengerti mengenai program tersebut, sehingga memudahkan untuk kordinasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan – pembangunan di kawasan Waterfront City.

#### IX. Daftar Pustaka

M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kabijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

William N. Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press: Yogyakarta.

Muhadjir Darwin. 1995. *Tahap-tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta, hal.1

Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya, hal. 179

Executive Summary Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru Riau 2012